

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH LEMBUR DI PT. PERTAMINA *TRAINING AND CONSULTING* INDONESIA

Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

Intisari
oleh

Wendy Lesmana¹ Ari Hermawan²

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja atas pemberian upah lembur pada PT Pertamina Training and Consulting Indonesia berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif empiris Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan subjek peneliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan, Negara belum mampu para melindungi hak – hak pekerja meskipun Negara sudah mengeluarkan payung hukum berupa Undang – Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya, perjuangan untuk mencari keadilanpun yang ditempuh baik mediasi dan konsiliasi yang difasilitasi instansi di level Legislatif maupun Eksekutif hingga bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang tetap tidak menguntungkan pekerja.

Kata Kunci : Upah Lembur, Tunjangan Performansi, Awak Muat Tangki.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Guru Besar Hukum Perburuhan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

LEGAL PROTECTION OF WORKERS ON GIVING OVERTIME WAGE RIGHTS IN PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING INDONESIA

Study of Decision of the Supreme Court Number: 351 K / Pdt.Sus-PHI / 2014.

Abstract

by

Wendy Lesmana¹ Ari Hermawan²

Abstract :

This study aims to find out and analyze legal protection for workers for overtime wages at PT Pertamina Training and Consulting Indonesia under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as well as to know and analyze the application of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in the Decision of the Supreme Court Number No. 351 K / Pdt.Sus-PHI / 2014.

This legal research is empirical normative research Normative research is carried out by library research to obtain secondary data through document studies. Empirical research was conducted with field research to obtain primary data through interviews with research subjects. The data obtained were analyzed qualitatively and the results were presented descriptively.

Based on the results of research and discussion, the author concludes, the State has not been able to protect workers' rights even though the State has issued a legal umbrella in the form of Law 13 of 2003 concerning Manpower and Peraturan Implementasi, the struggle to seek justice is taken both mediation and conciliation facilitated by agencies at the Legislative and Executive level until it reaches the Supreme Court Decision Number: 351 K / Pdt.Sus-PHI / 2014 which remains unfavorable to workers.

Keywords: Overtime Wages, Performance Allowances, Tank Load Crew.

1 Master of Law Student, Universitas Gadjah Mada

2 Professor of Labor Law at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta